

EKSISTENSI AKTIVIS PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH

Oleh:

Ismiati

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Email; ismiati38@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi dan jejak-jejak perjalanan kemanusiaan aktivis perempuan dalam membangun damai di Aceh. Kancha penelitian ini adalah para aktivis perempuan di Banda Aceh. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 15 orang aktivis perempuan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara dan FGD (focus group discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aktivis perempuan dalam membangun damai Aceh dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan dan juga politik, baik pada masa konflik maupun damai. Perempuan berjuang dan memainkan peran strategis untuk mempertahankan diri, keluarga dan komunitas masyarakat. Para aktivis perempuan aktif melakukan berbagai bentuk capacity building, penguatan dan pemberdayaan terutama bagi perempuan dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.

Kata Kunci: Eksistensi, Aktivis Perempuan

Abstract

This study aims to identify and understand the existence and traces of female activists humanitarian trip in building peace in Aceh. This research arena is the women activists in Banda Aceh. The informant involved in this research were 15 women activists were taken by purposive sampling technique. This study uses a qualitative approach, using interview techniques and FGD (focus group discussion). The results showed that the presence of women activists in the Aceh peace building can be seen from their involvement in various social activities and politics, both in times of conflict and peace. Women fought and played a strategic role to defend themselves, their families and communities. Women activists actively carry out various forms of capacity building, strengthening and empowerment, especially for women and contribute to the development.

Keywords: existence, Women Activists

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan Indonesia khususnya Aceh dari dulu sampai sekarang tidak hanya berperan dalam ruang domestik saja. Keberadaan perempuan dapat dilihat dalam bentuk partisipasi dalam dimensi publik dan politik seperti dalam upaya mewujudkan damai Aceh. Peran yang dilakonkan para aktivis perempuan baik masa konflik maupun damai adalah sebuah realitas, meskipun masih kurang terekspos. Sepanjang lintasan sejarah, di belahan negara manapun perempuan mempunyai peran dalam mewujudkan dan menciptakan situasi yang lebih baik, nyaman sebagai wujud naluri fitrah manusia, artinya sumber daya perempuan tidak dapat dinafikan.

Dinamika politik di Aceh telah melalui berbagai fase dalam sejarah, antara lain fase konflik, fase inisiasi damai dan kini fase damai. Keterlibatan aktivis perempuan dalam dinamika politik di Aceh juga memiliki arti penting di tengah menguatnya polarisasi antara berbagai kelompok politik dan tingginya potensi kekerasan yang mengancam kesuksesan dan keberlanjutan perdamaian. Anggota masyarakat yang terkotak-kotak dalam fraksi politik akibat konflik bukanlah hal yang mudah untuk disinergikan, sehingga memerlukan kekuatan kemampuan yang lebih mampu mensinergikan.

Konflik merupakan situasi yang pada dasarnya tidak dikehendaki, namun sepanjang sejarah kemanusiaan konflik senantiasa terjadi dalam berbagai bentuk antara lain konflik antar negara, konflik yang terjadi di dalam negara, dengan berbagai sebab seperti perdebatan status negara, pemerintahan yang otoriter dan atau karena benturan antara komunitas dalam sebuah negara itu sendiri yang disebut konflik internal. Aceh termasuk daerah yang berkonflik internal dan dapat diselesaikan dengan negosiasi. Aceh merupakan wilayah konflik sejak kurang lebih 30 tahun lalu, namun tepatnya pada 15 Agustus 2005 MoU Helsinki disepakati yang merupakan kesepakatan mengakhiri konflik dan kekerasan antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.

Konflik internal lazimnya ikut melibatkan semua pihak termasuk perempuan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai apapun keadaannya, dan pastinya memiliki imbas konflik bagi masyarakat pada umumnya. Imbas konflik biasanya menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan, teror, dan pembodohan, ketertinggalan yang secara sadar atau tidak disadari telah menjadikan daerah konflik sebagai daerah yang tertinggal. Konflik yang berkepanjangan mengakibatkan banyak korban jiwa, rumah dan lembaga pendidikan yang rusak, terbakar, kehilangan anggota keluarga (suami, anak, istri, orang tua saudara), bahkan menjadi yatim piatu di usia anak-anak, trauma, kawan dan lawan menjadi samar, hilang rasa kepercayaan, dan rusaknya silaturahmi. Sementara yang seringkali luput juga dari perhatian adalah bahwa selama konflik, perempuan adalah aktor penting yang memainkan peran strategis untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat, bahkan ketika semua laki-laki telah lari bersembunyi.

Sejarah panjang konflik Aceh antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka telah dimulai sejak 4 (empat) Desember 1976. Sejalan dengan panjangnya masa konflik internal yang

terjadi di Aceh, keberadaan perempuan dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian tidak boleh dinafikan. Berangkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para aktivis perempuan berikut akan diuraikan eksistensi aktivis perempuan dalam membangun dan memelihara perdamaian di Aceh.

Konflik Aceh yang panjang, dengan tekanan dan ancaman yang beragam, jelas bukan menjadi hal yang mudah untuk menegaknya bantuan kemanusiaan. Tetapi bantuan kemanusiaan jelas sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat di daerah konflik. Banyak aktivis yang menyadari situasi ini, tetapi tidak banyak yang berani untuk tetap bertahan memberikan bantuan kemanusiaan. Aktivis perempuan merupakan salah satu kelompok aktivis yang bertahan untuk ini. Atas semangat kemanusiaan, dengan tujuan kemanusiaan menjalani siasat wangi, membantu baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Banyak yang tahu tentang kiprah mereka saat itu, tapi tidak banyak yang mau menyuarakannya sebagai sebuah pengorbanan kepahlawanan kemanusiaan. Atas dasar inilah maka tulisan ini merupakan sebuah upaya penyadaran untuk mengenang jejak-jejak perjalanan kemanusiaan aktivis perempuan dalam membangun damai di Aceh.

B. Perempuan dalam Mitos dan Fakta Sejarah

Dalam studi sejarah filsafat diceritakan bahwa zaman mitologi merupakan awal sejarah manusia, oleh karenanya pembahasan seputar perempuan juga tidak terlepas dari mitos dan fakta sejarah yang melatarinya. Diduga ada hubungan antara pribadi laki-laki dan perempuan pada era mitologi yang dalam kenyataannya tidak dapat dibuktikan dengan materialisme sejarah. Di luar materialism sejarah, yang menarik adalah ketika laki-laki dan perempuan hidup dalam satu klan, mereka menghadapi eksistensi keterasingannya dalam *totem,mana* dan lingkungan yang dikuasainya, ketika individu terpisah dari komunitasnya, ia membutuhkan penjelmaan pribadi. *Mana* terindividualisasikan dalam sosok sang ketua, kemudian pada sosok sang individu. Pada waktu yang bersamaan, setiap orang mencoba menguasai sepetak tanah dan alat-alat perlengkapan hasil bumi. Laki-laki menemukan jati dirinya pada benda-benda yang menjadi miliknya. Ini karena sebelumnya ia telah dikalahkan oleh benda-benda tersebut. Karena itu dapat dipahami bahwa ia menempatkan benda-benda tersebut sebagai sesuatu yang nilainya hampir sama dasarnya dengan kehidupan. Hal itulah yang menyebabkan laki-laki pada hak miliknya menjadi suatu hubungan yang tidak bisa dipisahkan (identik dengan laki-laki), namun hal itu tidak dapat dijelaskan hanya melalui peralatan yang dikuasainya, tetapi harus dipahami melalui keseluruhan perilaku laki-laki sebagai pengguna alat tersebut dan dipandang sebagai penguasa lingkungan.¹

Pada masa Yunani Kuno kalangan elite menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang terkungkung dalam istana, bagi kalangan bawah perempuan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan di pasar. Mereka menganggap perempuan

1 Mufidah Ch, *Paradigmghafa Gender*, (Malang: Bayumedia, 2014), hlm. 20.

penyebab persengketaan, peperangan, kekacauan dan lambang kekejian. Sejarah juga mencatat nasib perempuan di negeri Jepang bagaikan tahanan rumah. Di Cina dan juga Eropa perempuan seperti budak yang tidak memiliki hak, demikian juga di Persia. Tradisi Arab Jahiliyah perempuan nyaris tanpa hak sama sekali, bayi perempuan tidak dibiarkan hidup².

Ketika Islam Datang, Al Quran memberikan perhatian yang sangat istimewa pada perempuan. Salah satu misi al quran adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat seperti Al-baqarah, an Nisa', an Nur, dan beberapa surah lainnya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah saw.

C. Status Perempuan dalam Islam

Islam telah menganugerahkan persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam semua lapangan kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memberikan hak yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan dapat menikmati hak dan status yang sama, meskipun dalam beberapa hal mengisyaratkan perbedaan dalam hak dan kewajiban semata-mata karena pertimbangan unsur natural, biologis, dan psikologis. Dapat dikatakan bahwa Islam memperlakukan perempuan dan laki-laki secara egaliter dalam sebahagian besar lapangan kehidupan.

Islam memberikan tuntutan yang tegas bahwa semua manusia, tanpa membedakan perempuan dan laki-laki diciptakan untuk sebuah misi yang sangat penting, yaitu sebagai khalifah *fil ardh* (pemimpin di bumi), paling tidak pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena itu, perempuan dan laki-laki diharapkan bekerja sama, bahu membahu, gotong royong untuk mewujudkan masyarakat yang damai, bahagia dan sejahtera atau dalam term alquran disebut *baladun thayyibatun warabbul ghaffur*.³ Fungsi inilah yang telah dilakukan para aktivis perempuan dengan kapasitasnya masing-masing baik pada masa konflik, inisiasi damai bahkan masa damai.

D. Motivasi Keterlibatan Aktivis Perempuan untuk Membangun Damai Aceh

Keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam sebuah perilaku atau tindakan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif. Motivasi adalah pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar tergerak untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu⁴. Menurut Sardiman motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu⁵. Berbicara faktor

2 Maria Ulfah dkk., *Modul Analisis Gender*, (Jakarta: Tim LKP2 PP Fatayat NU,2003), hlm. 49.

3 Musda Mulia, *Kemuliaan Manusia dalam Islam* (Jakarta: Megawati Institute, 2014) hlm. 48.

4 Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.71.

5 Sardiman A. M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta:Rajawali, 2012), hlm.75.

yang memotivasi keterlibatan aktivis perempuan dalam mewujudkan dan memelihara perdamaian dapat di bagi dalam dua kelompok : *Pertama*, motif keterlibatan mereka latabelakangi oleh pengalaman traumatis sebagai dampak kekerasan konflik yang mereka alami dan rasakan di lingkungan tempat tinggalnya masa pada kanak-kanak, sehingga mendorong kuat ekspresi kemanusiaan mereka untuk segera membantu masyarakat yang megalami masalah terkait konflik. *Kedua*, Aktivis yang tidak memiliki trauma konflik tetapi melakukannya atas dasar panggilan kemanusiaan, setelah berhadapan dengan persoalan perempuan dan konflik pada masyarakat yang telah lama mereka dampingi. Mereka memang orang-orang yang selalu bekerja di masyarakat akar rumput untuk pendampingan dan pemberdayaan perempuan. Sehingga ketika kerja sosialnya bersentuhan dengan persoalan konflik, yang otomatis perempuan merupakan korbannya, maka ini menjadi agenda kemanusiaan yang menuntut mereka untuk membantu dengan segenap kemampuan dan cara.

Berikut pengalaman menarik beberapa aktivis perempuan sebagai pemicu tumbuh-kembangnya jiwa semangat juang menjadi aktivis. Mereka mengakui bahwa sejak kecil sudah mulai memperhatikan kasus-kasus perpolitikan, sehingga pada usia dewasa ia mengambil sikap politiknya dengan cara bergabung dengan gerakan perlawanan untuk memperjuangkan dan membela hak-hak kemanusiaan.

Tampilnya para aktivis menurut narasumber yang diwawancarai memiliki latar belakang yang berbeda; ada yang mengatakan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan karena lingkungan keluarga, yaitu ayahnya aktif dalam partai politik dan mulai terlihat adanya ketidakadilan dari berbagai diskusi kritis yang dia dengar sehingga ia terpanggil untuk menghapus ketidakadilan. Narasumber yang lainnya mengatakan berawal dari adanya penyuluhan dan pendampingan terhadapnya sebagai korban KDRT dari berbagai lembaga kemudian diajak untuk memberi penyuluhan kepada korban yang lain. Narasumber lainnya dilatarbelakangi dari keterlibatan dalam pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti ketika mahasiswi, setelah kembali ke kampung termotivasi untuk membentuk lembaga massa damai.

Apapun motif yang melatarbelakangi tampilnya para aktivis, pastinya rata-rata mereka bergerak atas dasar keprihatinan mereka yang melihat kondisi kemanusiaan di Aceh. Hal ini disebabkan karena konflik antara RI dengan GAM telah memberikan dampak yang cukup menyakitkan terutama bagi rakyat Aceh.

Para aktivis bergerak atas dasar kemanusiaan dan prinsip anti kekerasan serta menolak penyelesaian masalah dengan mengangkat senjata. Dengan kata lain bukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, akan tetapi dengan menggunakan cara diplomatis adalah suatu upaya tindakan yang sangat diinginkan dan lebih manusiawi. Sehingga kajian-kajian kritis, diskusi tentang kondisi konflik sering dilakukan bersama organisasi LSM untuk membuka wawasan dan mencari solusi dalam membantu meringankan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai peristiwa akibat konflik, ketakutan, kehilangan keluarga, harta benda, dan

berbagai trauma konflik lainnya.

E. Kiprah Aktivistis Perempuan Dari Masa Konflik Sampai Damai

Kajian ini memperlihatkan bahwa di samping ada banyak perempuan yang menjadi korban dari konflik, ada sebagian perempuan lainnya yang bangkit berjuang mengakhiri konflik dengan damai; mereka adalah aktivis perempuan yang menjadi agen dan aktor penting dalam proses pembangunan perdamaian. Adalah fakta bahwa perempuan menanggung beban terberat dalam perang. Namun suara mereka nyaris tak terdengar dalam proses perundingan damai. Hal ini harus berubah. Negara-negara yang menghargai dan memberdayakan kaum perempuan untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan akan lebih stabil, sejahtera dan damai. Sebaliknya, ketika kaum perempuan, dikecualikan dari proses negosiasi, proses perdamaian akan menjadi lemah. Kepercayaan akan terkikis, hak asasi manusia, serta akuntabilitas, akan sering diabaikan.⁶

Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Mereka aktif melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang upaya pembangunan perdamaian. Kegiatan-kegiatan ini antara lain: kampanye penegakan hak-hak azasi manusia, khususnya perempuan, advokasi, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan dan kebutuhan pokok kepada masyarakat baik pada masa konflik maupun pada saat Tsunami. Konflik juga telah mendorong banyak perempuan di Aceh untuk menjadi aktivis perdamaian dan tokoh masyarakat. Sebahagian aktivis perempuan di Aceh merupakan mahasiswa pada masa konflik dan sangat bersemangat dalam menyuarakan isu perdamaian dengan ala mahasiswa, seperti demonstrasi dan juga tuntutan referendum. Sementara aktivis yang sudah lebih senior lebih mengupayakan dengan cara pendampingan korban, advokasi dan dialog dengan berbagai pihak untuk mencari format tentang Aceh damai. Banyak data sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan juga ikut bergabung dalam peperangan sebagai pejuang yang tangguh berdampingan dengan laki-laki. Dalam setiap event mereka memainkan peran yang sangat penting.⁷

Berikut akan diuraikan berbagai kiprah yang telah dilakukan oleh para aktivis perempuan Aceh dari masa ke masa, yaitu berbagai peran yang telah dimainkan sejak masa konflik, inisiasi damai, dan pada masa damai.

a. Peran Aktivistis Perempuan Masa Konflik

1. Melakukan pendampingan.

Pada masa konflik, perempuan melakukan pendampingan khususnya terhadap perempuan yang mengalami tekanan dari berbagai tindak kekerasan. Dampingan

6 Jhon Kerry (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), dikirim oleh Rachman Jaurinata-political- Economic Specialist, American Presence Post, Konsulat AS di Medan, ke Serambi Indonesia : 2014.

7 Amirullah Syarbaini, Islam Agama Ramah Perempuan, (Jakarta: Prima Pustaka, 2013), hlm. 50.

yang diberikan kepada korban biasanya dalam bentuk psikologis, seperti motivasi dan penguatan mental, perlindungan dan pemberdayaan.

2. Memberikan pendidikan kritis

Dalam menjalankan aktivitas pendampingan, aktivis perempuan juga melakukan pendidikan kritis untuk membangun kesadaran masyarakat menentang kekerasan konflik. Berbagai teknik dilakukan, seperti bergabung dengan kelompok wirid yasin, dan juga mengajak ibu-ibu rumah tangga melalui diskusi-diskusi informal. Hal ini dilakukan secara perlahan dan awalnya sembunyi-sembunyi karena memang kegiatan mereka ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Dengan teknik seperti ini, banyak ibu-ibu yang merasakan ketidakadilan, akhirnya mereka bangkit. Dari pendampingan ini, mulai bermunculan kaum perempuan yang berani menghadapi pihak-pihak yang dianggap dapat menzalimi keluarga mereka, menyuarakan ketidakadilan dan menuntut tindakan tegas terhadap pelaku.

3. Berjuang di ranah domestik dan publik, baik fisik maupun nonfisik.

Dalam konflik Aceh, tidak heran perempuan terkadang harus berperan dengan cara bergabung dalam gerakan perlawanan sekaligus ditempa sebagai penopang masyarakat, bahkan ada di antara mereka mengangkat senjata dan bertanggung jawab dalam urusan logistik dan jaringan, sekaligus berperan sebagai tulang punggung keluarga ketika para pria telah tiada atau berangkat bertempur. Perempuan Aceh dalam masa konflik menjadi denyut masyarakat yang berjuang di ranah domestik dan publik, baik fisik maupun nonfisik⁸.

Mereka tidak tahan menyaksikan berbagai kezaliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mereka. Di sisi lain, kiprah perempuan sangatlah tinggi. Banyak perempuan berjuang sendiri-sendiri, mereka tidak terorganisir. Tidak ada LSM yang memayungi mereka. Kondisi ini diakibatkan oleh rasa takut yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat luas. Ibu-ibu hanya berani bicara dari mulut ke mulut, namun tidak dalam bentuk yang terkoordinir secara rapi. Di sinilah memang nilai penting dari gerakan aktivis perempuan ini.

Selama konflik berlangsung banyak perempuan mengalami penindasan, banyak suami yang pergi meninggalkan isteri dan anak-anak serta keluarganya yang lain, seperti ibu dan saudara perempuannya. Kondisi seperti ini sangat riskan bagi perempuan. Untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di era konflik, aktivis perempuan mengaku tidak bisa menjalankan program pendampingan terhadap perempuan secara terang-terangan. Karena berdasarkan pengalaman yang ada, banyak perempuan yang melakukan pendampingan secara terang-terangan ditangkap oleh pihak-pihak yang bertikai. Di era konflik, aktivis dianggap satu bentuk afiliasi terhadap salah satu pihak yang bertikai.

⁸ Diskusi: Peran Perempuan Aceh dalam Masa Konflik dan Damai <http://rizkiaffiat.wordpress.com/liga-inong-aceh/diskusi-peran-perempuan-Aceh-dalam-masa-konflik-dan-damai/>

Dengan demikian aktivis yang ingin tetap eksis dan bisa berkiprah harus bergerak secara diam-diam dan menjaga netralitas mereka.

Pada masa konflik aktivis perempuan merelakan rumahnya sendiri menjadi rumah aman (*shelter*) bagi perempuan korban konflik, terutama bagi korban perkosaan. Disamping itu juga mereka membangun jaringan untuk perlindungan dan memberi keamanan pada perempuan korban. Mereka berusaha melindungi korban dengan berbagai cara.

Selain itu mereka menggalang dana untuk membantu para pengungsi. Hal ini dapat dilihat dengan usaha-usaha aktivis dalam memberikan bantuan pada korban, mulanya dari keingintahuan kemudian membantu dengan mencari bantuan dana bagi pengungsi, dan mendampingi korban pelecehan seksual khususnya bagi perempuan korban konflik.

Para aktivis juga mengumpulkan data-data dan menulis kronologis cerita akibat konflik dan mengirimkannya ke media sehingga dunia tahu apa yang terjadi di Aceh. Hal menarik lainnya bagaimana sulitnya aktivis mengungkapkan apa yang telah terjadi pada masa konflik. Karena ada korban konflik terutama korban perkosaan rata-rata tidak mau menceritakan pengalaman pahit ini pada orang lain. Namun dengan strategi empati, menempatkan para perempuan lain yang menyamar sebagai korban perkosaan, meski lambat akhirnya korban ini mau bercerita tentang apa yang dialaminya pada masa konflik.

Sementara aktivis lainnya secara aktif memohon kepada pemerintahan RI untuk mengusahakan perdamaian dengan cara melaporkan kejadian-kejadian bagaimana sengsaranya rakyat Aceh dan meminta Presiden untuk menarik Darurat Militer dari Aceh.

4. Peran Aktivis Perempuan Masa Inisiasi Damai

Kurang lebih 30 tahun Aceh mengalami situasi penuh kekerasan dan letusan senjata, untuk pertama kalinya pada tahun 2000 perempuan Aceh menyuarakan damai di Aceh. Ketika itu "damai" menjadi kata yang sangat mewah untuk disebut bahkan dipergunjingkan karena harus ditebus dengan pengorbanan jiwa raga. Dalam pada itu, Unifem Asia Timur dan Asia Tenggara (2007) mencatat bahwa bagi perempuan pada masa konflik, perdamaian bermakna suatu kebebasan. Bebas dalam beraktivitas, bertani, berbisnis, bepergian dan berkarya. Bagi perempuan ruang konflik adalah ruang penderitaan, karenanya perempuan paling menderita akibat konflik. Menuju perdamaian setidaknya harus melalui beberapa fase yang dalam siklus perdamaian dikenal tiga fase: *Peace making, peace keeping dan peace building*. Dalam fase-fase tersebut perempuan selalu mengambil peran-peran strategis. Pada fase *peace making*, perempuan berperan sebagai negosiator damai, dia juga bisa berperan sebagai pembebas tawanan dan juga peran dapur umum dan kesehatan. Namun demikian kelompok perempuan yang memperjuangkan perdamaian senantiasa diawali dengan membangun semangat bersama, membuat komitmen dan memperkuat konsolidasi. Gerakan perempuan ini yang kemudian membuat noktah sejarah kesuksesan gerakan perempuan dimana perempuan mampu menunjukkan posisinya tidak lagi pada peran-peran dapur, sumur dan kasur. Perempuan berkeinginan untuk juga dapat terlibat

dalam peran-peran strategis mengisi tata pemerintahan dan berpolitik.⁹

Peran aktivis pada masa inisiasi damai cukup besar, karena mereka inilah secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada upaya inisiasi perdamaian. Meski tidak semua mereka sempat berada di meja perundingan tetapi pendapat-pendapat mereka dalam menginisiasikan perdamaian membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi petinggi-petinggi baik dari GAM ataupun RI.

Kegiatan aktivis perempuan untuk menyuarakan keadilan dan pembebasan dari berbagai tindakan zalim bukanlah tanpa tantangan dan resiko. Banyak aktivis yang ditangkap. Para aktivis perempuan ini sangat menyadari hal itu. Namun karena telah menjadi panggilan hati mereka tetap menjalankan aktivitasnya. Pemerintah menganggap aktivis sebagai bentuk keberpihakan kepada GAM. Di pihak lain oleh GAM dianggap para aktivis justeru dianggap orang yang pro pemerintah RI. Jadi mereka berada pada posisi yang riskan. Inilah sebabnya, mereka harus benar-benar menjaga netralitas dan meyakinkan pihak-pihak yang bertikai bahwa mereka hanyalah menjalankan misi kemanusiaan tanpa menjadi bagian dari salah satu kelompok.

Situasi bekerja dalam tekanan dan harus tetap netral menjadikan aktivis perempuan bekerja sangat hat-hati. Ada kalanya masing-masing pihak yang berkonflik menganggap aktivis perempuan sebagai bagian dari pihak mereka masing-masing, dan adakalanya aktivis dianggap sebagai bagian dari pihak lawan. Kedua-duanya memberikan resiko yang mengancam keselamatan mereka. Tidak heran jika pada saat itu banyak pihak lebih memilih diam dan menjauh dari berbagai hal yang ada kaitannya dengan konflik, agar lebih aman. Aktivis perempuan juga sebenarnya bisa saja memilih jalan ini, karena ini yang umumnya dipilih oleh banyak orang. Akan tetapi tuntutan peran dari masyarakat dampingan, kenalan dan lingkungan yang menempatkan aktivis perempuan sebagai penolong dan pembela hak-hak korban konflik yang dipercaya oleh korban, membuat aktivis perempuan mengabaikan berbagai resiko yang sangat mereka sadari akan senantiasa mengancam keselamatannya. Panggilan kemanusiaannya menguat dan membuat mereka menjalani berbagai upaya membangun damai dengan sangat hati-hati namun pasti.

Demonstrasi juga dilakukan aktivis perempuan, untuk menuntut penyelesaian konflik Aceh melalui damai. Berbagai cara dan upaya disuarakan dalam teriakan demonstrasi untuk mengajak semua pihak mengupayakan damai, dan meminta pemerintah berfikir tentang damai. Aktivis yang bersuara dengan cara demonstrasi ini, umumnya adalah aktivis muda yang umumnya mahasiswa.

Kemampuan perempuan untuk bernegosiasi sudah dibuktikan dari masa ke masa, baik pada saat perang sedang berkecamuk masa konflik maupun dalam proses inisiasi menuju damai. Menjadi negosiator adalah salah satu kegiatan aktivis untuk merajut damai dalam situasi konflik.

Pada masa konflik perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk membangun

9 http://www.Acehpeaceprocess.net/pdf/Aceh_report5_indo2.

wacana damai. Sebagai aktivitas yang dilakukan seperti memberikan rangkaian bunga kepada setiap pengguna jalan yang melewati lampu merah, dengan mengusung tema damai. Pendekatan itu dilakukan untuk membuat masyarakat agar mulai berpikir tentang damai dan bukan hanya mengedepankan emosi dan tindakan kekerasan. Wacana penyelesaian konflik melalui damai menjadi bagian yang penting dalam proses inisiasi damai Aceh karena penyelesaian damai ini bukan yang diharapkan oleh pihak GAM dan simpatisannya di masyarakat, yang berharap konflik selesai dengan kemenangan dalam arti kemerdekaan bagi Aceh. Damai sendiri dianggap sebagai kemunduran cita-cita perjuangan. Akan tetapi kelompok perempuan yang secara langsung berhadapan dengan perempuan, anak dan masyarakat lainnya yang menjadi korban, semakin yakin membangun wacana ini karena semakin lama konflik yang terjadi maka semakin banyak korban yang ditimbulkan.

Cita-cita untuk segera mengakhiri konflik dengan damai inilah yang membuat sekelompok aktivis perempuan Aceh membangun diskusi-diskusi kecil yang tentunya juga harus sangat hati-hati untuk mencari strategi mewujudkan damai ini. Diskusi diskusi yang terus bergulir memunculkan mimpi baru tentang Aceh yang damai, memunculkan alternative strategi yang bisa dimainkan oleh kelompok perempuan, dan melahirkan konsep-konsep dan rencana aksi yang prioritas dilakukan dalam rangka mencapai Aceh yang damai.

Damai adalah kata yang sarat dengan kenyamanan. Lamanya masa konflik bukanlah keadaan yang menguntungkan, banyaknya kerusakan tidak hanya korban nyawa, bangunan fisik, institusi-institusi yang mencerdaskan, lembaga pendidikan, rusaknya kultur sosial masyarakat, meningkatnya kemiskinan, trauma yang berkepanjangan, hancurnya peradaban, sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bukan hal yang diinginkan oleh siapapun. Situasi damai dan sejahtera sesungguhnya adalah keinginan naluri fitri setiap manusia. Damai dipahami bukan sekedar kondisi bebas dari peperangan, penindasan, dan kekerasan belaka. Lebih luas lagi, perdamaian seharusnya dapat mendorong terciptanya keadilan yang seimbang atas hak-hak warga Negara secara proporsional. Proporsional dalam arti memberikan perhatian sesuai dengan kondisi dan beban yang ditanggungnya akibat konflik. Dalam situasi yang tidak damai, beban yang dialami tentu jauh lebih berat dibandingkan dengan masa dalam situasi normal.

Perempuan menanggung beban yang berat dalam situasi konflik. Ketika laki-laki terpaksa harus lari atau dibunuh atau hal lainnya, ini berarti dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Sebagai konsekuensinya adalah perempuan mengambil alih tugas kepala rumah tangga. Padahal sebelumnya, kebanyakan masyarakat memahami perempuan hanya untuk mengurus tugas-tugas di dalam rumah tangga atau tugas domestik. Pada posisi tersebut sesungguhnya perempuan sudah berada pada dua peran ganda, peran sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga dan pendidik anak. Belum lagi, jika pada saat yang bersamaan perempuan teribat dalam proses perjuangan. Baik itu perjuangan bersenjata, perjuangan menegakan hak yang terlanggar pada diri dan

keluarganya ataupun perjuangan untuk menegakkan perdamaian itu sendiri.

Fakta menunjukkan bahwa perempuan menjadi korban dari konflik yang terjadi di Aceh. Kasus-kasus kekerasan baik fisik dan non-fisik semakin tinggi. Penegakan hukum pada saat kondisi konflik atau perang sesungguhnya pada kondisi lumpuh. Perempuan yang mengalami kasus perkosaan, penyiksaan yang menjurus pada alat reproduksi dan aksi-aksi tak bermoral tidak dapat berbuat banyak dan seandainya pun terungkap hanya menjadi data-data yang belum tentu ditindaklanjuti dari sisi hukum. Demikian pula perempuan yang menjadi janda akibat perang. Kelompok ini akan menjadi perempuan kepala rumah tangga, mendidik anak dan mencari nafkah buat keluarga. Jika perempuan-perempuan berupaya mendorong penegakan hak-hak yang terlanggar bagi dirinya, secara kultur di Aceh (dan di wilayah lain umumnya), pendapat perempuan cenderung diabaikan karena dianggap tidak mengetahui apa-apa soal peperangan (konflik).¹⁰

Kondisi demikian justeru membangkitkan semangat para perempuan untuk berpikir tentang arah damai Aceh, berbagai strategi dilakukan sebagai proses inisiasi menuju damai, dengan berbagai tahapannya, dan aktivis perempuan memulainya melalui diskusi kelompok kecil yang relatif tertutup. Salah satu tahap awal yang mereka lakukan adalah mendesain langkah menuju damai. Setiap pertemuan, desain yang dirancang mendapat penyempurnaan dan masukan dari peserta diskusi, hingga akhirnya desain ini dianggap matang. Salah satu yang termasuk dalam rencana yang disusun pada saat itu adalah membuat kongres perempuan Aceh. Akan tetapi kondisi dan situasi pada saat itu belum memungkinkan bagi kelompok aktivis perempuan ini untuk mewujudkannya. Pertama terkait kemampuan sumber daya kelompok perempuan yang sevisi juga belum terpetakan, sumber daya keuangan juga belum memungkinkan, ditambah situasi konflik yang semakin menguat. Oleh karenanya kertas desain yang berisi rencana aksi yang perlu dilakukan terpaksa harus digulung, dan disimpan untuk sementara hingga situasi menjadi mungkin. Tahap ini disebut dengan masa **Gulung Kertas** karena konsep ini terpaksa mereka simpan karena suasana pada saat itu dianggap belum tepat untuk disampaikan ke publik, karena situasi keamanan yang tidak kondusif. Kelompok aktivis perempuan memilih bersabar dan menyimpan ide-ide yang sudah dipikirkan untuk menempuh jalur damai bagi konflik Aceh.

Demikianlah segulung kertas yang menjadi saksi ide dan fikiran aktivis perempuan menuju Aceh damai, tersimpan, sambil menunggu terbukanya jalur yang tepat untuk mengalirkannya dalam mainstream gerakan menyelesaikan konflik Aceh melalui damai. Akhirnya salah satunya terbuka melalui terselenggaranya Kongres Perempuan Aceh yang pertama di Banda Aceh, yang berkontribusi bagi damainya Aceh

Satu hal yang menjadi catatan penting adalah ada juga pada masa inisiasi damai sekelompok aktivis terutama yang berasal dari kalangan mahasiswa cenderung menuntut referendum untuk Aceh, karena yang mereka pikirkan saat itu adalah referendum

10 Lihat, http://mirisa.files.wordpress.com/2008/07/proses-perdamaian-Aceh_keterlibatan-perempuan

merupakan jalan damai bagi Aceh. Untuk kalangan *grass root* mereka mengorasikan betapa pentingnya damai di Aceh.

Jauh sebelum negara-negara modern ramai membahas tentang peran perempuan, sebenarnya perempuan Aceh sudah membuktikannya lewat perannya yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah dipimpin oleh seorang perempuan, yang memerintah dengan adil dan memberi ketenangan dan keadilan. Pada masa konflik perempuan Aceh turut serta dalam membenahi dan mencari solusi untuk masalah Aceh yang lebih baik. Lima tahun sebelum berlangsung penandatanganan MoU antara GAM dan RI di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005, sebuah kongres akbar digelar oleh perempuan Aceh. Kongres tersebut berlangsung pada Februari 2000. Kongres yang mengusung tema perempuan dan perdamaian “*Krue Seumangat Ureung Inong Aceh Bak Duek Pakat Keu Aceh yang Aman, Damai ngon Ade*” (Semangat bagi Perempuan Aceh yang Duduk Bersama untuk Aceh yang Aman, Damai dan Adil) dikenal sebagai *Duek Pakat Inong Aceh* (Kongres Perempuan Aceh Pertama).

Kongres yang dihadiri 437 perempuan, dengan peserta dari berbagai latar belakang dan profesi, ada ibu rumah tangga, dosen, petani, pengacara, pekerja sektor informal, bidan, dokter, aktivis NGO, ormas perempuan, mahasiswa, nelayan, ulama, tokoh masyarakat, guru, dan pengusaha mencoba untuk duduk bersama untuk berdialog. Sebagian di antara mereka adalah perempuan yang menjadi korban langsung dari konflik seperti kehilangan orang-orang yang dikasihi, mendapat penyiksaan atau intimidasi atau harus tinggal di tempat-tempat pengungsian karena rumahnya dibakar. Dalam latar belakang hidup mereka berbagi kepedihan, pengalaman pahit berbaur dengan kekuatan yang mencengangkan, bersama merajut impian dan merancang masa depan. Perempuan berbagi pandangan, cinta dan harapan bahwa kita bisa membuat Aceh lebih baik dalam kondisi damai. Karenanya, damai menjadi syarat mutlak guna menciptakan Aceh yang lebih baik. Inilah kongres yang pertama kali mengusung isu damai di Aceh. Kongres yang menawarkan penyelesaian konflik bukan dengan kekerasan. Hasil rumusan pertemuan disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk kepada presiden ketika itu, Abdurrahman Wahid, agar pemerintah mengedepankan dialog sebagai penyelesaian konflik Aceh. Pada Pertengahan Mei sampai dengan Juni 2000 kelompok perempuan melobby berbagai pihak melibatkan perempuan sebagai salah satu wakil Pemerintah RI dan GAM dalam proses jeda kemanusiaan yang difasilitasi *Henry Dunant Centre*.

Kegiatan DPIA ini menemukan berbagai kendala, baik pada saat perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Berbagai kesulitan ditemukan karena pada saat ini juga terjadi polemik di kalangan masyarakat, ada yang menganggap bahwa Aceh baru bisa damai hanya melalui referendum atau reintegrasi bagi Aceh. Akan tetapi semua perbedaan akhirnya bisa selesaikan dengan musyawarah dalam kongres. Apapun keputusannya adalah hasil kongres yang berhak menentukan. Satu hal yang menjadi catatan penting dan bersejarah adalah dari kongres ini lahir rekomendasi “Damai untuk Aceh”, ibarat seteguk air yang sangat menyejukkan di tengah cuaca yang sangat panas. DPIA pertama,

meskipun munculnya pada saat konflik, namun dapat dikatakan sebuah gerakan yang mempertemukan berbagai elemen ini merupakan cikal bakal gerakan perempuan Aceh Pasca Kemerdekaan. Karena pertemuan penting ini adalah gebrakan terbesar yang dilakukan organisasi perempuan secara bersama-sama.

Salah satu yang terpenting adalah hasil kongres yang tidak mengedepankan kepentingan politik dan kepentingan lainnya selain kemaslahatan, memberikan jawaban yang dipercaya bagi banyak pihak yang bertanya tentang “apa yang menjadi keinginan rakyat Aceh”. Jawaban ini adalah jawaban yang berangkat dari suara hati banyak perempuan Aceh. “Damai untuk Aceh” artinya adalah hentikan konflik. Dan cara yang terbuka pada saat itu adalah melalui perundingan. Hasil kongres yang punya pengaruh bagi kejelasan keinginan rakyat Aceh ini, menjadikan sekelompok atifis perempuan yang menginisiasinya mendapat ancaman-ancaman. Diantaranya karena ada sebagian kelompok di masyarakat yang meyakini bahwa damainya Aceh hanya jika merdeka, artinya harus terus berperang untuk mendapatkannya.

Sejarah perjuangan perempuan terutama pada masa konflik sudah tidak dibantah lagi, perempuan Aceh menjadi salah satu ujung tombak pada masa konflik. Jika ditelusuri dengan cermat, sejak masa berlangsungnya Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh pada tahun 1989 hingga penandatanganan Nota Kesepakatan Damai Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005, perempuan senantiasa menggulirkan protes-protes kecil hingga besar. Perempuan tampil berani di tengah-tengah. Ditengah-tengah konflik Aceh antara GAM-RI, yang sangat mencegangkan. Di satu sisi perempuanlah yang paling parah menerima imbasnya. Mereka diperkosa atau mengalami pelecehan seksual, menjadi gawang kekuatan keluarga dalam tekanan jiwa. Namun di pihak lain perempuan aktivis dengan naluri kemanusiaannya dapat memompa keberanian untuk hilir-mudik di antara ujung bedil pihak yang bertikai. Mereka siap menerima risiko mengevakuasi mayat di hutan atau tepi jalan, bahkan datang bernegosiasi ke markas militer untuk memohon warga dibebaskan, mengadvokasi hak-hak korban, menyelematkan banyak korban, serta menemani masyarakat dan harus siap menjadi tiang yang menguatkan mereka. Sementara banyak aktivis laki-laki justeru tiarap di rumah atau menyelamatkan diri ke wilayah lain, dan bersembunyi sambil melanjutkan pendidikan, dengan alasan situasi konflik yang tidak menguntungkan bagi laki-laki.

Perempuan bukan hanya korban pasif dalam situasi konflik, mereka merupakan agen dan aktor penting dalam proses pembangunan perdamaian. Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Pada saat perundingan damai perempuan juga terlibat sebagai juru runding.

Berbagai aktivitas telah dilakukan perempuan dalam mengorganisir masyarakat pada tingkat *grassroot*. Kegiatan pendampingan yang telah mulai dilakukan pada masa konflik tidak berhenti di masa damai. Hanya saja pada masa damai bentuk kegiatannya yang dilakukan lebih leluasa dan lebih beragam.

Era awal pasca MoU ini disebut-sebut juga era kebijakan baru Aceh. Karena salah

satu mandat MoU adalah keberadaan UU Pemerintahan Aceh. Sehingga Undang Undang ini menjadi pondasi penting bagi pembentukan Aceh kedepan. Sehingga keterlibatan aktif perempuan mengadvokasi isu perempuan di undang-undang ini menjadi agenda yang sangat penting. Awalnya kelompok aktivis perempuan bergerak spontan tanpa nama untuk mencoba melihat ruang isu perempuan di draft UU ini. Hingga akhirnya kelompok ini menyadari tidak ada satu pasal pun yang dapat menjadi pintu kebijakan bagi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan memperkuat gerakan secara lebih sistematis. Dan terbentuklah Jaringan Perempuan Untuk Kebijakan (JPUK) yang terdiri dari lembaga dan individu yang konsern mengawal isu perempuan dalam kebijakan.

Beberapa statemen aktivis lainnya yang juga melakukan advokasi untuk isu lainnya menyebutkan bahwa gerakan advokasi kelompok perempuan ini lebih maju beberapa langkah dari gerakan advokasi kelompok lainnya. Kelompok perempuan menjadi pembawa jalan bagi kelompok aktivis lainnya dalam mengadvokasi UU ini. Menariknya kemudian aktivis perempuan mengatur langkah, dengan berbaur secara aktif dalam leading sector masyarakat mengawal UU Pemerintahan Aceh versi DPRA. Setelah aman dengan enam pasal kunci di UU ini, selanjutnya sembari mengawal, kelompok perempuan aktif menjadi tim substansi, tim advokasi campaign dan tim lobby untuk memperjuangkan UUPA versi DPRA. Keberadaan banyak perempuan di jalur ini telah berkontribusi banyak dalam proses pengawalan UU ini, selain proses ini memberi pengalaman baru bagi kelompok masyarakat sipil termasuk perempuan. Setelah itu pula, aktivis perempuan terlibat dalam proses penyusunan berbagai kebijakan di Aceh

Ketangguhan perempuan telah teruji dalam berbagai situasi, mulai dari masa konflik sampai masa Aceh dilanda gempa dan Tsunami. Menurut para akktivis yang diwawancarai memang kalau dilihat sebenarnya perempuan Aceh itu kuat, punya *survive* sendiri. Aktivis lainnya menambahkan “Pada saat bencana Tsunami, padahal dia sendiri adalah korban, tapi masih mampu membantu korban yang lain”. Aktivis lainnya mengatakan “mungkin karena sejak lama kita sudah terstruktur kerja kerasnya, karena berbeda juga dengan teman-teman yang baru memulai”.

Pecahnya konflik di daerah Aceh telah mendorong perempuan-perempuan membentuk organisasi dan membangun jaringan kerjasama di bidang perdamaian. Meskipun sebagian besar organisasi dan jaringan kerjasama perempuan di wilayah ini masih relatif baru, mereka telah memainkan peran yang penting dalam mendukung kegiatan pembangunan, perdamaian dan meningkatkan kondisi perempuan. Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan antara lain memperjuangkan hak perempuan, membangun pemberdayaan ekonomi perempuan, melakukan advokasi, dan menyediakan serta menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah organisasi dan jaringan kerjasama perempuan di Aceh memainkan peran yang penting dalam melaksanakan dan mendukung kegiatan pembangunan perdamaian dan pemberdayaan perempuan di daerah Aceh. Salah satu forum yang menampung pandangan-pandangan mereka tentang proses perdamaian adalah jaringan perdamaian perempuan yang dibentuk bulan Desember 2005. Tujuan

forum tersebut adalah untuk mempercepat kerjasama kelompok –kelompok perempuan agar mendapatkan lebih banyak informasi tentang proses perdamaian dan agar lebih didengarkan dalam proses perdamaian. Tujuan yang paling penting dari forum yang beranggotakan 25 organisasi ini adalah mendukung terwujudnya perdamaian yang Abadi di Aceh.

Jaringan perdamaian perempuan ini ingin mengetahui tentang tingkat pemahaman perempuan Aceh tentang perdamaian dan pemahamannya tentang Nota Kesepahaman, sehingga dapat diketahui sejauh manadampak perdamaian terhadap masyarakat dan apa saja kemampuan, potensi, dan kebutuhan perempuan. Hasil penelitian ini akan di serahkan ke pihak AMM (*Aceh Monitoring Mission*) atau lembaga misi monitoring Aceh. Selain itu keberadaan forum ini juga mensosialisasikan Nota Kesepahaman, menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat, memperkuat dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam strategi mewujudkan perdamaian dan memberikan penguatan agar perempuan mempunyai kemampuan dalam proses pengambilan keputusan.¹¹ Berdasarkan data-data di atas dapat dikatakan bahwa perempuan mampu berperan ganda baik dalam wilayah domestik dan publik, baik dalam masa konflik maupun damai.

F. Penutup

Tidak *dapat* dipungkiri bahwa ketika terjadinya konflik, perempuan adalah korban yang menanggung beban terberat dan sangat menderita lahir batin. Betapa banyak perempuan yang terpaksa menjadi janda dan harus menanggung beban hidup terhadap anak-anak yang ditinggalkan suami yang telah mati diterjang peluru. Banyak perempuan mengalami trauma karena telah menjadi korban keganasan seksual akibat diperkosa dan harus menanggung beban malu. Di sisi lain ada sebagian perempuan lainnya yang bangkit berjuang mengakhiri konflik dengan damai, mereka adalah aktivis perempuan yang menjadi agen dan aktor penting dalam proses pembangunan perdamaian. Berbagai peran terbaca dalam banyak aktivitas, meliputi aktivitas sosial kemasyarakatan, politik, baik dalam situasi damai maupun dalam situasi konflik. Sangat manusiawi jika peran-peran demikian menjadi bahagian dari aktivitas perempuan karena ruang publik juga bagian dari ruang kehidupan yang selamanya dihadapi.

¹¹ *Crisis Management Initiative, kerja sama dengan dana bantuan PBB untuk Perempuan (UNI-FEM)*, Laporan : Proses Perdamaian Aceh, 2006. hlm. 19.

REFERENSI

- Amirullah Syarbaini, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Jakarta: Prima Pustaka, 2013.
- Crisis Management Initiative, kerja sama dengan dana bantuan PBB untuk Perempuan (UNIFEM)*, Laporan : Proses Perdamaian Aceh, 2006.
- Maria Ulfah dkk., *Modul Analisis Gender*, Tim LKP2 PP Fatayat NU, 2003.
- Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2014.
- Musda Mulia, *Kemuliaan Manusia dalam Islam* (Jakarta: Megawati Institute, 2014).
- Jhon Kerry (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), dikirim oleh Rachman Jaurinatapolitical-Economic Specialist, American Presence Post, Konsulat AS di Medan, ke Serambi Indonesia : 2014.
- Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sardiman A. M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta:Rajawali. 2012.
- http://mirisa.files.wordpress.com/2008/07/proses-perdamaian-Aceh_keterlibatan-perempuan
- <http://forjusticeandpeace.wordpress.com/2010/08/08/perempuan-dan-perdamaian>